



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Realisasi Penerimaan Negara*. Diakses pada tanggal 7 Januari 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1085/1/realisasi-pengeluaran-negara-keuangan.html>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods* 12th Edition. In *Business Research Methods*.
- DDTC (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) 2021. Apa Itu Relawan Pajak. Diakses pada 8 Februari 2022, <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-relawan-pajak-33717>
- DDTC 2021. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021. Diakses pada 8 Februari 2022, <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-12pj2021>
- Denny Vissaro. (2021). *Jenis Pajak Daerah Bakal Diubah, Ada Apa Saja yang Berlaku Sekarang?*. Diakses pada 11 Februari 2022, <https://news.ddtc.co.id/jenis-pajak-daerah-bakal-diubah-ada-apa-saja-yang-berlaku-sekarang-31360>
- Direktorat Jenderal Pajak 2013. *Lebih Dekat Dengan Pajak*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Direktorat Jenderal Pajak 2017. *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Diakses pada 8 Februari 2022, <https://pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak 2019. *Business Development Service, Perluasan Akses Jaringan Bisnis UMKM*. Diakses pada 8 Februari 2022, <https://pajak.go.id/berita/business-development-service-perluasan-akses-jaringan-bisnis-umkm>
- Direktorat Jenderal Pajak 2021. *Paradigma Generasi Milenial Bijak dan taat Pajak Saat Pandemi*. Diakses pada 8 Februari 2022, <https://pajak.go.id/id/artikel/paradigma-generasi-milenial-bijak-dan-taat-pajak-saat-pandemi>
- Direktorat Jenderal Pajak 2021. *Sekarang Sudah Ada Fungsional Penyuluh Pajak*. Diakses pada 8 Februari 2022, <https://pajak.go.id/id/artikel/sekarang-sudah-ada-fungsional-penyuluh-pajak>

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 Dilarang menjiplak atau seluruh atau sebagian isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 HaCipta Dilindungi Undang-undang
 © Ditata oleh IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi Pajak. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.
<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>

Direktorat Jenderal Pajak. Jenis Pajak Pusat. Diakses pada 10 Februari 2022,
<https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>

Direktorat Jenderal Pajak. Penagihan. Diakses pada tanggal 27 November 2021.
<https://www.pajak.go.id/id/penagihan>

Eirdayani, Layuk, P.K.A, dan Allolayuk, T. 2017, 'Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura), diakses pada 17 November 2021,
<http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/view/24/18>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Cetakan Ke, 9.

Heri, Agus 2019. *APBN dan APBD*. Diakses pada 15 Januari 2022,
<https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/APBN%20dan%20APBD-BB/Topik-4.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 8 Februari 2022, <https://kbbi.web.id/saran>

Kementerian Keuangan 2017. Menanamkan Kesadaran Pajak Sejak Dini Melalui Pajak Bertutur. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021,
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menanamkan-kesadaran-pajak-sejak-dini-melalui-pajak-bertutur/>

Kementerian Keuangan. 2016. Laporan Kinerja Kemenkeu. Diakses pada 15 Januari 2022,
<https://www.kemenkeu.go.id/media/6313/laporan-kinerja-kemenkeu-2016.pdf>

Kementerian Keuangan. 2017. *APBN 2017*. Diakses pada 15 Januari 2022,
<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>

Kementerian Keuangan. *Struktur Organisasi Kementerian Keuangan*. Diakses pada 19 Februari 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/profil/struktur-organisasi-kementerian-keuangan/>

Lubis, Farida Khairani 2017, 'Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan', vol. 6, no.1, diakses pada 17 November 2021,



<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/view/1407>

Mohammad, Indira, David P.E.S, Sonny P 2017, 'Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado', vol. 12 no. 2, diakses pada 17 November 2021,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/18370/17898>

Muhammad, Arfaningsih, Sunarto 2018, 'Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015', vol. 2, no. 1, diakses pada 17 November 2021,

<https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/2220/pdf>

Ortax 2021. Kenali Ruang Lingkup Jenis dan Kriteria Pemeriksaan Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses pada 15 Januari 2022, <https://ortax.org/kenali-ruang-lingkup-jenis-dan-kriteria-pemeriksaan-pengujian-kepatuhan-pajak>

Rahman, Opnita 2017, 'Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan *Sunset Policy* Jilid II Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Pekanbaru', vol. 4 no.1, diakses pada 17 November 2021,

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/13010/12652>

Rahyuni, Sri, Andi N., Julianty S.T. 2020, 'Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah', vol. 6, no. 1, diakses pada 17 November 2021, <http://repository.umi.ac.id/707/2/717-1778-1-PB.pdf>

Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Lembaran Negara RI Tahun 2000, No 3987. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.



Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.01/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PML.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Research Methods for Business, 6th Edition: A Skill Building Approach*. John Wiley & Sons.

Setiawan, Doni Agus 2021. *Wajib Pajak Diimbau Lakukan Ini*, diakses 12 Januari 2022 <https://news.ddtc.co.id/dapat-surat-teguran-dari-djp--wajib-pajak-diimbau-lakukan-ini-32744>

Wahdi, Nirsetyo, Ratna W., Danang 2018, 'Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu', vol. 20, no. 2, diakses pada 17 November 2021, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/1242>